



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

KPK Umumkan Survei Integritas Sektor Publik 2013

Jakarta, 16 Desember 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei Integritas Sektor Publik (SI) 2013 di hadapan sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal serta pemerintah daerah, hari ini Senin (16/12) bertempat di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. SI 2013 menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK terakhir merilis hasil survei yang sama.

“Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah,” papar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan instansi layanan publik misalnya, tambah Busyro, terkait mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan.

Survei Integritas kali ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200 responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5640 responden. “Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara *face to face* dalam kurun waktu Mei – September 2013,” jelas Busyro.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Survei Integritas Sektor Publik pada tahun ini menyertakan layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Sejak 2012, program koordinasi supervisi pencegahan KPK melakukan observasi terhadap layanan PBJ selain sektor strategis lainnya. Di samping itu, korupsi di sektor PBJ masih mendominasi penanganan kasus di KPK.

Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP

Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300
www.kpk.go.id | Twitter: @KPK RI

LAMPIRAN

Indeks Integritas Pusat

INTEGRITAS	VARIABEL		INDIKATOR	SUB-INDIKATOR		
Integritas Total (1.00) = 7,37	Pengalaman Integritas (0.667)	7,61	Pengalaman Korupsi (0.250)	7,57	Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)	7,38
					Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)	7,59
			Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)	7,62	Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)	7,67
					Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)	7,70
	Potensi Integritas (0.333)	6,91	Lingkungan Kerja (0.127)	8,34	Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)	7,59
					Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)	8,04
					Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)	9,95
					Keterlibatan Calo (0.221)	8,34
					Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)	7,76
					Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)	7,60
			Sistem Administrasi (0.280)	6,74	Kepraktisan SOP(0.281)	7,15
					Keterbukaan Informasi (0.584)	6,74
					Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)	5,90
			Perilaku Individu (0.280)	7,51	Keadilan dalam Layanan (0.413)	7,81
					Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)	7,42
					Perilaku Pengguna Layanan (0.260)	7,14
			Pencegahan Korupsi (0.313)	5,94	Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)	6,28
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)	4,91					

Indeks Integritas Pusat – 10 Instansi Pusat Tertinggi

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	Total
1	Badan Pengawas Obat dan Makanan	7,95	7,17	7,69
2	Kementerian Lingkungan Hidup	7,85	7,23	7,64
3	RS. Fatmawati	7,99	6,77	7,58
4	Badan Koordinasi Penanaman Modal	7,80	7,11	7,57
5	Kementerian Pertanian	7,71	7,03	7,49
6	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	7,85	6,69	7,46
7	RS. Cipto Mangunkusumo	7,79	6,75	7,45
8	Kementerian Kesehatan	7,75	6,73	7,41
9	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7,58	7,07	7,41
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7,57	7,06	7,40

Indeks Integritas Pusat – 10 Instansi Pusat Terendah

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	Total
11	Kementerian Keuangan	7,64	6,86	7,38
12	Kementerian Perindustrian	7,49	6,99	7,32
13	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	7,60	6,73	7,31
14	Kementerian Perdagangan	7,42	6,99	7,28
15	Kementerian Luar Negeri	7,52	6,70	7,24
16	Kementerian Perhubungan	7,30	7,09	7,23
17	Kementerian Kehutanan	7,62	6,32	7,19
18	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7,24	6,88	7,12
19	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	7,41	6,45	7,09
20	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6,96	6,73	6,88

Indeks Integritas Vertikal

INTEGRITAS	VARIABEL		INDIKATOR	SUB-INDIKATOR			
Integritas Total (1.00) = 6,71	Pengalaman Integritas (0.667)	7,10	Pengalaman Korupsi (0.250)	7,19	Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)	6,82	
					Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)	7,33	
				Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)	7,20		
			Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)	7,07	Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)	6,98	
		Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)		7,10			
	Potensi Integritas (0.333)	5,91	Lingkungan Kerja (0.127)	7,52		Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)	6,24
						Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)	9,77
						Keterlibatan Calo (0.221)	8,05
						Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)	7,63
						Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)	7,56
			Sistem Administrasi (0.280)	6,24		Kepraktisan SOP(0.281)	6,89
						Keterbukaan Informasi (0.584)	6,08
						Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)	5,53
			Perilaku Individu (0.280)	6,27		Keadilan dalam Layanan (0.413)	7,32
						Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)	5,89
						Perilaku Pengguna Layanan (0.260)	5,09
			Pencegahan Korupsi (0.313)	4,66		Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)	4,68
					Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)	4,58	

Indeks Integritas Vertikal – 5 Instansi Vertikal

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	Total
1	Mahkamah Agung	7,62	6,06	7,10
2	Kementerian Hukum dan HAM	7,40	6,17	6,99
3	Kepolisian Republik Indonesia	6,99	5,90	6,63
4	Kementerian Agama	7,03	5,55	6,54
5	Badan Pertanahan Nasional	6,67	5,72	6,36

Indeks Integritas Daerah

INTEGRITAS	Indeks	Tanpa pbj	VARIABEL	Indeks	Tanpa pbj	INDIKATOR	Indeks	Tanpa pbj	SUB-INDIKATOR	Indeks	Tanpa pbj			
Integritas Total (1.00)	6,82	6,98	Pengalaman Integritas (0.667)	7,23	7,48	Pengalaman Korupsi (0.250)	7,27	7,56	Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)	6,98	7,36			
									Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)	7,35	7,63			
						Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)	7,34	7,59						
						Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)	7,22	7,45	Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)	7,00	7,17			
			Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)	7,29	7,54									
			Potensi Integritas (0.333)	6,00	5,98				Lingkungan Kerja (0.127)	7,81	8,13	Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)	6,83	7,43
												Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)	9,57	9,87
												Keterlibatan Calo (0.221)	8,45	8,47
												Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)	7,65	7,82
												Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)	7,59	7,70
												Kepraktisan SOP (0.281)	7,24	7,32
									Sistem Administrasi (0.280)	6,42	6,39	Keterbukaan Informasi (0.584)	6,24	6,16
												Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)	5,54	5,43
									Perilaku Individu (0.280)	6,88	7,09	Keadilan dalam Layanan (0.413)	7,48	7,54
Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)	6,72	6,97												
Pencegahan Korupsi (0.313)	4,09	3,76	Perilaku Pengguna Layanan (0.260)	6,14	6,54									
			Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)	4,01	3,60									
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)	4,33	4,26												

Indeks Integritas Daerah – 10 Pemda Tertinggi

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	TOTAL
1	Pemko Pare Pare	7,83	7,46	7,71
2	Pemko Surabaya	7,93	6,98	7,61
3	Pemko Bitung	7,66	7,29	7,54
4	Pemko Tanjung Pinang	7,87	6,77	7,50
5	Pemko Gorontalo	7,89	6,70	7,49
6	Pemko Pematang Siantar	7,79	6,63	7,41
7	Pemko Mataram	7,75	6,56	7,36
8	Pemko Denpasar	7,67	6,56	7,30
9	Pemko Bogor	7,66	6,54	7,29
10	Pemko Yogyakarta	7,56	6,71	7,28

Indeks Integritas Daerah – 10 Pemda Terendah

No.	Instansi	Indeks Integritas		
		Pengalaman	Potensi	TOTAL
51	Pemko Bandar Lampung	6,75	5,64	6,38
52	Pemkab Jember	6,58	5,76	6,31
53	Pemko Semarang	6,39	6,10	6,29
54	Pemko Balikpapan	6,31	5,96	6,19
55	Pemko Palu	6,80	4,88	6,16
56	Pemko Bima	6,77	4,74	6,10
57	Pemko Pekanbaru	6,34	5,46	6,05
58	Pemko Bengkulu	6,51	5,09	6,04
59	Pemko Palangkaraya	6,28	5,35	5,97
60	Pemko Jayapura	5,83	5,36	5,68